

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Sejarah dan Perkembangan

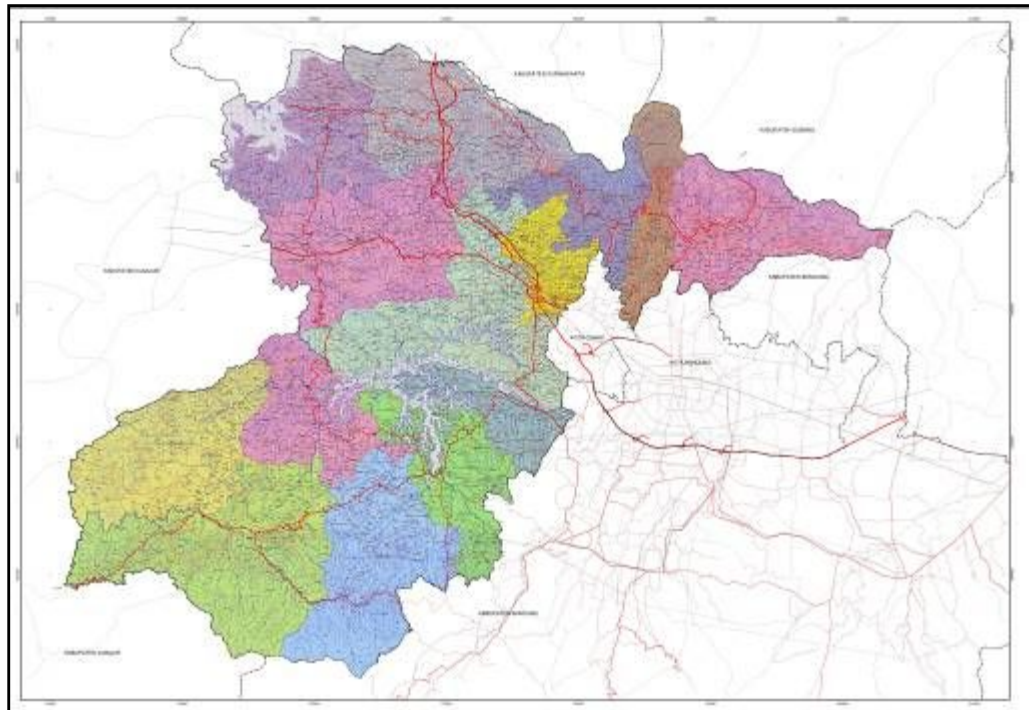
Sebelum terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemekaran Kabupaten Bandung sudah menjadi wacana. Saat itu Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat kepada Bupati Bandung untuk mengkaji rencana pembentukan kabupaten baru. Usulan gubernur waktu itu adalah pembentukan Kabupaten Padalarang yang mencakup Bandung Barat dan Kota Administratif Cimahi.

Lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan keinginan masyarakat itu dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Di tingkat provinsi, lahir Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tentang persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri bernomor 135.1/1197/Desen tertanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.

2.2 Posisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bandung Barat secara geografis terletak pada diantara 107° 1,10' sampai dengan 107° 4,40' Bujur Timur dan 6° 3,73 sampai dengan 7° 1,031 Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577 ha. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat terletak diantara Kabupaten atau Kota lain yang relatif telah berkembang, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu seluas 16.796,2 ha (12,29%) dan terkecil adalah Kecamatan Ngamprah seluas 3,608 ha (2,76%). Luas kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Bandung Barat tertera pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kabupaten Bandung Barat

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	JUMLAH DESA
1	Cililin	81,55	11
2	Cihampelas	46,63	10
3	Sindangkerta	120,35	11
4	Gununghalu	160,80	9

5	Rongga	113,12	8
6	Cipongkor	76,15	14
7	Batujajar	83,68	13
8	Lembang	98,27	16
9	Parongpong	43,39	7
10	Cisarua	55,36	8
11	Ngamprah	36,09	11
12	Padalarang	51,58	10
13	Cipatat	125,50	12
14	Cipeundeuy	101,25	12
15	Cikalongwetan	112,08	13
Total		1.305,77	165

Sumber: Suseda, BPS Kabupaten Bandung, 2007 dan Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2007

2.3 Administrasi Pemerintahan

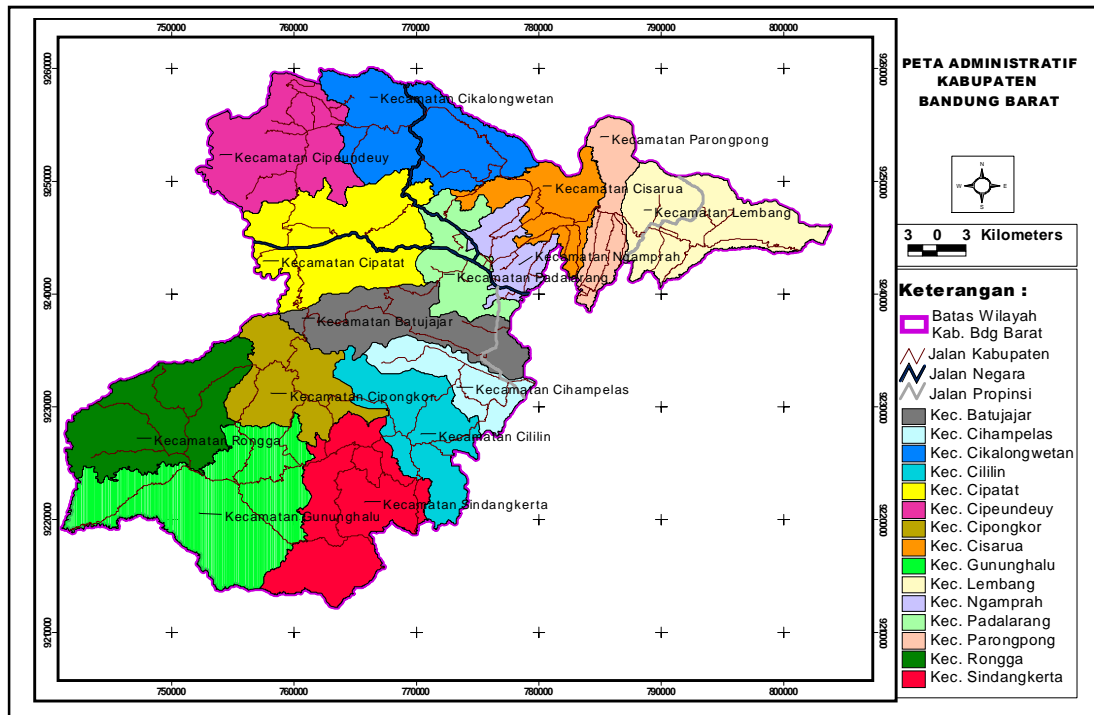
Secara administratif, batas-batas pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta); Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cislak (Kabupaten Subang);

Timur : Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);

Selatan : Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);

Barat : Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung,



Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

Gambar 2.2. Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat

2.4 Kondisi Fisik Wilayah

Iklim. Zona agroklimat di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zone agroklimat B1, B2, dan B3. Zone agroklimat B1, B2 dan B3 mempunyai bulan-bulan basah (> 250 mm/bl) selama 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan bulan kering (<100 mm/bl) <2 bulan (Zone B1) atau bulan kering antara 2-3 bulan (Zone B2) atau bulan kering >3 bulan (Zone B3).

Tanah. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei humus dan alluvial sekitar 28.938,40 ha atau 23,84% dari luas Kabupaten Bandung Barat.

Kemiringan Lereng. Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal >40 (46,5%). Hal ini tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat wilayahnya didominasi oleh kawasan yang berfungsi lindung. Sedangkan kawasan yang wilayahnya bertopografi datar dan bergelombang sampai berbukit relatif kecil dan diusahakan sebagian besar untuk lahan pertanian. Luasan untuk masing-masing kemiringan tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha)

NO.	KECAMATAN	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Cililin	1.640	1.140	-	710	3.986
2	Cihampelas	2.150		-	490	2.701
3	Sindangkerta	1.064	600	4.350	425	5.596
4	Gununghalu	320	-	400	1.880	13.480
5	Rongga	1.700	-	292	507	8.812
6	Cipongkor	2.210	200	2.050	1.090	2.075
7	Batujajar	4.899	-	580	-	2.889
8	Lembang	1.530	-	5.201	-	2.970
9	Parongpong	2.290	-	950	-	1.225
10	Cisarua	530	-	2.292	1.500	1.214
11	Ngamprah	1.160	-	379	1.650	420
12	Padalarang	4.096	202	860	-	-
13	Cipatat	2.950	710	1.950	-	6.940
14	Cipeundeuy	2.450	-	3.200	-	4.475
15	Cikalongwetan	550	-	3.400	3.200	4.058
TOTAL		29.539	2.852	25.904	11.452	60.841

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2006.

Ditinjau dari ketinggian wilayah menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat terletak pada ketinggian 500-1000 mdpl (46,48%), 1000-1500 m dpl (8,10%), sisanya terletak pada ketinggian <500 m dpl.

Penggunaan Lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 ha atau 1,34% Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan

budidaya masih menempati areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2004

NO	JENIS GUNA LAHAN		TOTAL LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
A	KAWASAN LINDUNG			
	1	Kawasan lindung		
		a. Kawasan lindung	48,339.40	36.95
B	KAWASAN BUDIDAYA			
	1	Budidaya Pertanian		
		a. Kebun campur	13,622.62	10.41
		b. Perkebunan	13,453.61	10.28
		c. Sawah	22,101.56	16.89
		d. Sawah Tadah Hujan	60.66	0.05
		e. Tegal/Ladang	19,003.55	14.53
	2	Budidaya Non Pertanian		
		a. Bandara	4.85	0.00
		b. Industri	465.86	0.36
		c. Institusi/fasum	258.73	0.20
		d. Jalan	1,965.69	1.50
		e. Jalan Kereta Api	47.79	0.04
		f. Lapangan Golf	5,00	0,01
		g. Pasar / Pertokoan	7.86	0.01
		h. Perumahan	9,281.11	7.09
		i. Stadion/ Lapangan	51.48	0.04
		j. Taman	20.66	0.02
		k. Tambang	432.12	0.33
C	LAINNYA			
		a. Tanah Kosong	1,104.71	0.84
		B Rumput	107.65	0.08
		c. Awan dan Bayangan	536.93	0.41
JUMLAH TOTAL A,B,C			130.821,73	100,00

Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029, 2008.

Sumberdaya Air. Sumberdaya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan air merupakan potensi konflik apabila tidak ada usaha dari pemerintah untuk melestarikan sumber air dan mengatur pemakaiannya, baik untuk keperluan pertanian, industri, perumahan maupun jasa lainnya. Beberapa sumber air di Kabupaten Bandung Barat yang perlu dilestarikan dan dipelihara fungsinya adalah: Sungai Citarum dan anak sungainya, Danau atau Situ (Situ Ciburuy, Situ Lembang dan Situ Umar) dan Waduk atau reservoir (Saguling dan Cirata).

Terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri jasa lainnya menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan air, baik yang berasal dari air bawah tanah maupun air permukaan.

Dari hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung dibagi ke dalam beberapa zona:

Zona kritis untuk pengambilan air bawah tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar.

Zona rawan untuk pengambilan air bawah tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m^3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar. Daerah resapan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Lembang dan Cisarua.

Daerah aman pengambilan air bawah tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m^3 per hari dengan jumlah sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.

Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kawasan terbangun, kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua.

Zona bukan cekungan air bawah tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m^3 per bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga.

Ditinjau dari aspek geologi, tanah dan kemiringan lereng, hampir di 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang kehilangan fungsi ekonomi maupun fungsi hidrologis. Lahan-lahan tersebut perlu mendapat perhatian terutama ditinjau dari aspek konservasi maupun tata guna lahan.

2.5 Perekonomian Daerah

2.5.1 Kontribusi PDRB per Lapangan Usaha

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten berciri industri dan sektor-sektor berbasis perkotaan yang signifikan. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 telah mencapai nilai sekitar Rp 12,28 triliun (Tabel 2.4) atau setara dengan Rp. 6,76 triliun menurut harga konstan tahun 2000 (Tabel 2.5). Lapangan usaha industri pengolahan berkontribusi atas 46.7% total PDRB kabupaten, sedangkan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 18,97% dari total PDRB (Tabel 2.6). Dengan demikian kontribusi dua sektor ini mencapai lebih dari 65% PDRB kabupaten. Walaupun berkontribusi cukup dominan terhadap PDRB, namun secara spasial perkembangan sektor-sektor tersebut terkonsentrasi secara terbatas di beberapa kecamatan berciri perkotaan, dengan kepadatan permukiman tinggi yang berbatasan langsung dan memiliki aksesibilitas (kemudahan daya capai) ke Kota Bandung dan Cimahi. Sektor Industri, khususnya terkonsentrasi di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar dan sebagian Cipatat.

Adapun sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Khususnya di sekitar Kecamatan Padalarang, Lembang, Parongpong, dan Cisarua yang merupakan kawasan tujuan wisata utama di Kabupaten Bandung Barat.

Di luar sektor industri serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha lainnya yang utama adalah lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2007 kontribusi lapangan usaha pertanian di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 10.70% dari seluruh PDRB Kabupaten. Dominasi sektor pertanian menonjol di semua wilayah kecamatan di luar kawasan sentra permukiman, industri dan perdagangan, baik di bagian utara, tengah dan lebih khususnya di bagian selatan Kabupaten Bandung Barat. Walaupun kontribusinya terhadap PDRB tidak lagi dominan, namun lapangan usaha pertanian masih merupakan lapangan usaha terbesar di dalam menyediakan lapangan kerja di Kabupaten Bandung Barat serta merupakan sektor hulu,

penyedia jasa-jasa lingkungan dan berbagai bentuk eksternalitas positif bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tabel 2.4. PDRB KBB Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku

NO.	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	871.454,18	1.040.290,87	1.176.470,08	1.299.815,28
2	Pertambangan dan Penggalian	38.458,65	45.148,08	50.372,04	55.816,82
3	Industri Pengolahan	3.720.997,18	4.435.844,35	5.110.400,64	5.761.640,36
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	550.702,55	657.321,76	750.971,05	842.017,50
5	Bangunan/Konstruksi	180.505,56	215.651,63	248.035,52	279.999,26
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.453.838,05	1.723.352,17	1.965.591,51	2.267.290,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	474.597,50	549.712,45	706.213,57	809.614,85
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	215.420,87	253.994,06	285.361,53	324.895,06
9	Jasa – Jasa	401.041,84	481.075,34	555.600,37	642.692,59
PDRB TANPA MIGAS		7.907.016,39	9.402.390,70	10.849.016,31	12.283.781,76

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Tabel 2.5. PDRB KBB Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	668.467,41	704.610,56	708.201,37	722.700,91
2	Pertambangan dan Penggalian	30.111,57	31.759,16	33.797,27	35.665,74
3	Industri Pengolahan	2.709.653,55	2.848.886,35	3.004.815,85	3.160.393,70
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	413.971,35	435.805,61	457.785,64	481.574,28
5	Bangunan/Konstruksi	139.487,75	144.771,83	153.501,58	160.681,26
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.074.262,60	1.125.609,76	1.197.600,96	1.281.607,69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	330.727,79	341.390,88	363.080,60	385.678,62
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	164.231,72	172.532,49	181.161,87	193.490,27
9	Jasa – Jasa	282.245,70	294.647,56	313.470,54	335.214,43
PDRB TANPA MIGAS		5.813.159,44	6.100.014,20	6.413.415,68	6.757.006,91

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Tabel 2.6. Proporsi (%) masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB KBB Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	11,50	11,55	11,04	10,70
2	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,52	0,53	0,53
3	Industri Pengolahan	46,61	46,70	46,85	46,77
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,12	7,14	7,14	7,13
5	Bangunan/Konstruksi	2,40	2,37	2,39	2,38
6	Perdagangan,Hotel & Restoran	18,48	18,45	18,67	18,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,69	5,60	5,66	5,71
8	Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	2,83	2,83	2,82	2,86
9	Jasa – Jasa	4,86	4,83	4,89	4,96

Sumber: olahan atas data BPS

2.5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa tahun terakhir, sesuai dengan besaran kontribusinya terutama didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor lain walaupun kontribusinya lebih rendah namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang cukup tinggi adalah juga sektor keuangan, dan jasa perusahaan (Tabel 2.7). Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ini dapat tercapai dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga. Inflasi Tahun 2007 tercatat sebesar 7,47 lebih rendah dari Tahun 2006 sebesar 9,75%. Laju inflasi secara keseluruhan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan sebesar 1,28%, lebih jelas lihat Tabel 2.8.

Tabel 2.7. LPE KBB 2000 Tahun 2005 - 2007 (Persen) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	6,63	5,41	0,51	2,05
2	Pertambangan dan Penggalian	9,92	5,47	6,42	5,53
3	Industri Pengolahan	4,84	5,14	5,47	5,18
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,47	5,27	5,04	5,20
5	Bangunan/Konstruksi	7,68	3,79	6,03	4,68
6	Perdagangan,Hotel & Restoran	5,33	4,78	6,40	7,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,02	3,22	6,35	6,22
8	Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	11,16	5,05	5,00	6,81
9	Jasa – Jasa	7,13	6,10	4,68	5,28
10	LPE	5,48	4,93	5,14	5,36

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Tabel 2.8. Inflasi KBB Tahun 2004 – 2007

NO.	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	5,65	13,25	12,52	8,27
2	Pertambangan dan Penggalian	10,15	11,30	4,84	5,00
3	Industri Pengolahan	4,72	13,38	9,23	7,19
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,26	13,38	8,76	6,59
5	Bangunan/Konstruksi	9,54	15,11	8,48	7,84
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,34	13,13	7,20	7,79
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,86	12,21	20,80	7,92
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,89	12,23	7,00	6,60
9	Jasa – Jasa	9,04	14,91	8,56	8,17
10	Inflasi	13,32	9,75	9,75	7,47

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Jika dibandingkan dengan tahun 2004 secara umum terjadi pelambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 dan 2006, terutama di sektor-sektor pertanian, pertambangan, keuangan dan jasa-jasa. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran secara umum relatif semakin meningkat laju pertumbuhannya.

2.6 Perdagangan dan Jasa

Ciri kekotaan suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan sektor tersiernya. Oleh karena itu, gambaran tentang kegiatan perdagangan dan jasa dapat menjadi salah satu gambaran awal tentang perkembangan perkotaan wilayah, dalam hal ini Kecamatan Lembang berada pada urutan teratas. Toko kelontong merupakan unit perdagangan terbanyak di Kabupaten Bandung Barat. Toko kelontong di Kecamatan Lembang berjumlah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk jumlah jenis secara keseluruhan, Kecamatan Lembang cukup dominan. Lembang dan Cisarua potensial sebagai tempat wisata melihat adanya jasa agen wisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Selain fasilitas tersebut, Kecamatan Lembang pun memiliki fasilitas swalayan terbanyak. Berdasarkan data Podes BPS Pusat, pada tahun 2006 dari 41 unit swalayan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 19 unit atau hampir 50% dari keseluruhan fasilitas tersebut berada di Kecamatan Lembang.

Tabel 2.9. Unit Perdagangan dan Jasa

NO.	KECAMATAN	PASAR NON PERMANEN	SWALAYAN	RESTORAN	KEDAI MAKAN	TOKO KELONTONG	HOTEL	PENGINAPAN	BENKEL KENDARAAN	BENKEL ELEKTRONIK	FOTO KOPI	AGEN WISATA	PANGKAS RAMBUT	SALON KECANTIKAN	BENKEL LAS	SEWA ALAT PESTA
1	Cililin	1	2	20	10	975	0	0	28	23	12	0	7	15	9	11
2	Cihampelas	1	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sindangkerta	3	0	5	18	961	0	0	9	12	4	0	4	6	4	18
4	Gununghalu	2	2	0	33	465	0	0	19	11	7	0	11	7	8	2
5	Rongga	7	0	0	100	290	0	0	12	12	1	0	3	2	2	5
6	Cipongkor	7	3	14	163	992	0	0	34	24	10	0	7	15	8	11
7	Batujajar	1	2	4	248	1.246	0	11	15	12	1	0	8	24	16	21
8	Lembang	6	19	68	280	1.737	40	10	77	51	26	2	43	53	46	26
9	Parongpong	0	1	6	82	351	0	1	20	15	6	0	9	12	11	12
10	Cisarua	0	2	11	375	1.244	0	0	25	20	12	2	17	24	20	6
11	Ngamprah	1	3	23	112	179	0	1	41	35	15	0	36	47	39	18
12	Padalarang	2	2	10	120	154	1	0	18	11	4	0	4	14	13	4
13	Cipatat	0	1	1	167	415	0	0	29	17	5	0	14	11	11	6
14	Cipeundeuy	0	2	26	368	154	0	0	21	21	10	0	25	17	11	11
15	Cikalongwetan	1	2	26	390	158	0	0	22	22	11	0	26	17	12	12
TOTAL		32	41	214	2.466	9.378	41	23	370	286	124	4	214	264	210	163

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.6.1 Jasa Keuangan

Unit jasa keuangan yang terbanyak di Kabupaten Bandung Barat adalah dalam bentuk koperasi (157 unit). Hingga tahun 2006 masih dijumpai beberapa kecamatan yang tidak memiliki bank (bank umum dan BPR) seperti Kecamatan Cihampelas, Sindangkerta, Rongga, dan Batujajar. Distribusi jasa keuangan tertera pada Tabel 2.10.

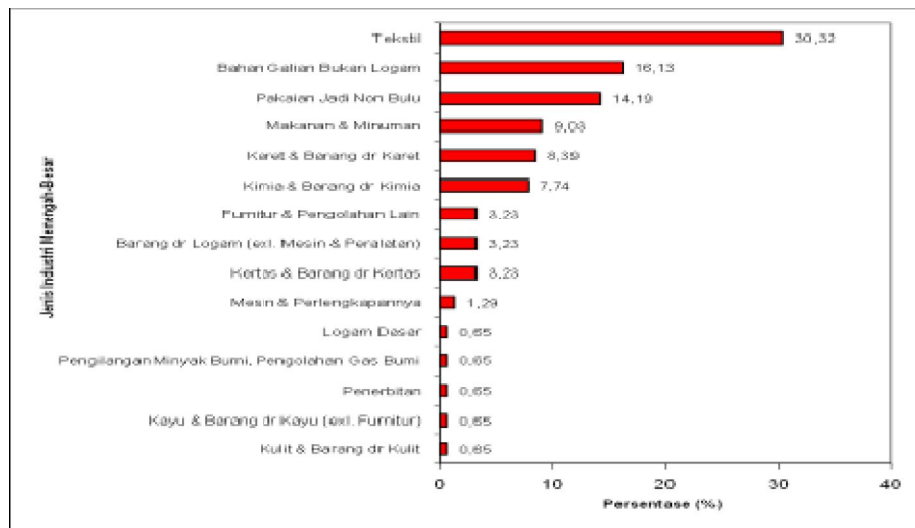
Tabel 2.10. Unit Jasa Keuangan

NO	KECAMATAN	BANK UMUM	BP R	KOPERAS I	KU D	KOPINKR A	KOPERAS I SIMPAN PINJAM	KOPERAS I NON KUD
1	Cililin	1	0	12	1	0	11	0
2	Cihampelas	0	0	1	0	0	1	0
3	Sindangkerta	0	0	20	1	0	13	6
4	Gununghalu	1	1	13	1	0	3	9
5	Rongga	0	0	5	0	0	3	2
6	Cipongkor	2	2	16	1	0	12	3
7	Batujajar	0	0	5	0	0	2	3
8	Lembang	7	5	15	1	0	9	5
9	Parongpong	1	0	9	4	0	2	3
10	Cisarua	1	1	16	0	0	14	2
11	Ngamprah	8	2	13	1	0	9	3
12	Padalarang	1	0	11	1	0	7	3
13	Cipatat	1	2	12	1	0	9	2
14	Cipeundeuy	1	1	4	0	0	0	4
15	Cikalongwetan	1	1	5	1	0	0	4
TOTAL		25	15	157	13	0	95	49

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.6.2 Industri

Industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang, seperti LIK/PIK. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Pemusatan dan jumlah industri di Kabupaten Bandung Barat tertera pada Tabel 2.11. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20% (Gambar 2.3)



Gambar 2.3. Jenis Industri Menengah Besar

Tabel 2.11. Pemusatan dan Jumlah Industri

KECAMATAN	PEMUSATAN INDUSTRI (DESA)			JUMLAH INDUSTRI (UNIT)									
	KAWASAN INDUSTRI	SENTRA INDUSTRI	LIK/PIK	INDUSTRI BESAR	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI KECIL							
						KULIT	KAYU	LOGAM	ANYAMAN	GERABAH	KAIN	MAKANAN	LAINNYA
Cililin	0	0	0	0	0	0	4	0	589	0	0	219	0
Cihampelas	0	0	0	0	0	0	3	0	24	0	0	24	4
Sindangkerta	0	0	0	0	0	0	37	0	67	0	0	235	204
Gununghalu	0	0	0	1	0	1	64	0	79	0	0	87	4
Rongga	0	0	1	0	0	0	27	0	34	0	0	20	305
Cipongkor	0	0	0	0	0	0	35	0	201	0	0	391	0
Batujajar	0	0	0	48	9	0	3	0	1	0	0	16	10
Lembang	0	0	0	3	14	1	40	0	2	0	36	35	4

Parongpong	0	0	0	0	2	0	12	1	2	6	4	20	2
Cisarua	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0
Ngamprah	0	0	0	10	10	0	6	0	38	0	15	133	5
Padalarang	7	3	5	108	59	1	5	2	7	5	5	33	0
Cipatat	0	0	1	4	10	1	26	1	1	10	0	2	0
Cipeundeuy	0	0	0	0	0	0	23	3	157	0	0	65	11
Cikalongwet an	0	0	0	2	3	0	23	8	45	0	0	130	17
TOTAL	7	3	7	17	10	4	31	1	1.25	2	6	1.41	56
				6	7		1	5	3	1	0	0	6

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.6.3 Perusahaan Pertanian

Perusahaan pertanian yang bergerak di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan relatif banyak terdapat di desa-desa Kabupaten Bandung Barat. Melihat konsentrasinya berdasarkan lokasinya dan jumlah desa, perusahaan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Lembang, perusahaan perkebunan di Kecamatan Cipatat, perusahaan peternakan di Kecamatan Cihampelas, dan perusahaan perikanan di Kecamatan Cililin (Tabel 2.12)

Tabel 2.12. Perusahaan Pertanian (Jumlah Desa)

KECAMATAN	TAN. PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	KEHUTANAN	LAINNYA
Cililin	0	0	1	3	0	0
Cihampelas	0	0	7	2	0	0
Sindangkerta	2	0	2	0	0	0
Gununghalu	0	1	0	0	0	0
Rongga	3	1	0	0	1	0
Cipongkor	1	1	1	1	1	1
Batujajar	1	1	2	0	0	0
Lembang	4	1	1	0	0	0
Parongpong	2	1	2	0	0	0
Cisarua	1	0	0	0	0	0
Ngamprah	0	0	0	0	0	0
Padalarang	0	0	0	0	0	0
Cipatat	0	5	1	1	1	0
Cipeundeuy	0	1	0	1	0	0
Cikalongwet tan	0	4	0	0	1	0
TOTAL	14	16	17	8	4	1

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.6.4 Pertanian

2.6.4.1 Bidang Pertanian

Penilaian potensi wilayah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan komoditas yang diunggulkan, luas lahan pertanian, dan dukungan kelembagaan:

Komoditas Unggulan

Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi beberapa komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji, pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan, gladiola, anggrek. Sebaran komoditas tersebut terletak di sebelah utara Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua. Selain komoditas tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk dikembangkan di sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah, jagung, dan kacang-kacangan.

Luas Lahan dan Lokasi

Luas lahan pertanian di Kabupaten Barat terdiri dari lahan basah (sawah dan kolam) seluas 12.168 ha, lahan darat seluas 118.409 ha yang terdiri dari lahan pekarangan seluas 16.691 ha, tegalan/kebun seluas 33.359 ha, ladang/hutan 24.597 ha, pengangonan 503 ha, lain-lain 43.259 ha. Wilayah kecamatan yang memiliki luas tanam paling banyak di Kecamatan Gununghalu, seluas 3.804 ha, selanjutnya di Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Rongga dan Cihampelas.

Berbeda dengan luas tanam, wilayah yang paling besar luas panennya berada di Kecamatan Sindangkerta, sebesar 4.677 ha. Beberapa kecamatan lainnya yang memiliki daya dukung luas panen yang cukup besar antara lain: di Kecamatan Gununghalu, Cicalongwetan, Cipatat, Rongga dan Cihampelas. Sedangkan untuk produksi yang dihasilkan, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi adalah di Kecamatan Sindangkerta, sebesar 26.533 ton. Beberapa kecamatan lainnya yang produksinya cukup

besar antara lain: di Kecamatan Gununghalu, Cikalongwetan, Cipatat, Rongga, dan Cihampelas.

Berdasarkan data rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa, kecamatan yang memberi kontribusi terbesar dalam komoditas padi sawah di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Cikalongwetan, Cipatat, Cihampelas, dan Rongga. Oleh karena itu beberapa daerah ini perlu diperhatikan untuk merencanakan dan mengembangkan Program Agribisnis Pertanian Terpadu di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk komoditas padi gogo, wilayah kecamatan yang memiliki luas tanam terbesar adalah di Kecamatan Batujajar, sebesar 1.636 ha. Beberapa kecamatan lainnya yang memiliki luas tanam cukup besar antara lain: di Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Padalarang, dan Gununghalu.

Wilayah yang paling luas panen dan tanamnya, yaitu di Kecamatan Batujajar. Sedangkan daerah Kecamatan yang menghasilkan produksi padi gogo paling tinggi adalah di Kecamatan Batujajar, sebesar 5.589 ton. Beberapa kecamatan lainnya yang menghasilkan produksi padi gogo adalah di Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Padalarang, Gununghalu, Cipeundeuy dan Cikalongwetan. Meskipun masing-masing kecamatan memiliki luas tanam dan luas panen yang berbeda, akan tetapi memiliki rata-rata produktivitas padi gogo yang menyebar merata di 15 Kecamatan.

Komoditas lainnya yang luas panennya terbesar adalah komoditas jagung, seluas 5.138 ha, komoditas lainnya antara lain: ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, dan kedelai. Sedangkan komoditas yang memiliki luas panen paling kecil adalah komoditas kacang hijau, sebesar 51 ha. Sedangkan komoditas yang memberikan kontribusi produksi paling besar adalah komoditas ubi kayu, sebesar 81.904 ha, komoditas lainnya antara lain: jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan komoditas yang memberikan kontribusi paling kecil diantara komoditas lainnya adalah kacang hijau, sebesar 51 ton.

Komoditas yang memberikan kontribusi rata-rata produktivitas cukup besar dibandingkan dengan komoditas lainnya adalah komoditas ubi kayu dan ubi jalar, masing-masing sebesar 167.56 Kwt/Ha, dan 106.08Kwt/Ha.

Sedangkan untuk komoditas sayuran yang memiliki luas tanam paling besar adalah Kembang Jamur dan Kembang Kol, masing-masing seluas 9.050 Ha dan 1.003 ha. Komoditas unggulan di Kabupaten Bandung Barat antara lain: Alpukat, Jambu biji, dan Melinjo. Untuk komoditas alpukat, produksi yang dihasilkan adalah 51.125 ton, komoditas ini tersebar di 15 kecamatan. Produksi melinjo adalah 15.824 ton, Lokasi penanaman komoditas ini tersebar di kecamatan Rongga, Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah, Cipatat, dan Parongpong.

Komoditas tanaman yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Kabupaten Bandung Barat antara lain: Anggrek, glandiola, krisan dan sedap malam. Luas panen dari komoditas tanaman anggrek sebesar 1.930 hektar, dengan kontribusi produksi yang dihasilkan sebesar 22.752 tangkai. Lokasi penanaman komoditas ini difokuskan di Kecamatan Lembang, Batujajar, dan Parongpong. Luas panen tanaman glandiola, sebesar 429.000 m², dengan kontribusi yang dihasilkan sebesar 8.838.000 ton. Lokasi penanaman komoditas tanaman ini difokuskan di Kecamatan: Lembang, Cisarua, dan Parongpong.

Luas panen komoditas tanaman krisan adalah sebesar 801.800 m² dengan kontribusi produksi komoditas tanaman ini sebesar 34.417.800 tangkai. Lokasi penanaman pada komoditas ini lebih difokuskan di Kecamatan Lembang, Cisarua, Ngamprah, dan Parongpong. Komoditas tanaman obat-obatan memiliki luas panen yang cukup luas di Kabupaten Bandung Barat ini, yaitu 495,7 ha.

Kelembagaan

Perkembangan kelembagaan usaha pertanian ditunjukkan dengan telah terbentuknya 1.508 kelompok tani yang beranggotakan 67.683 orang dan kelembagaan pendukung diantaranya telah terbentuk asosiasi jagung, hortikultura, tanaman hias dan kelembagaan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Andalan) tingkat kabupaten.

2.6.4.2 Permasalahan Bidang Pertanian

Secara umum permasalahan di bidang pertanian di Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian;
2. Sistem alih teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran;
3. Rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum memenuhi prinsip berkeadilan (asimetrik);
4. Akses terhadap pelayanan usaha dan permodalan terbatas;
5. Kualitas, mentalitas dan keterampilan sumberdaya petani rendah;
6. Kelembagaan petani dan posisi tawar petani masih rendah;
7. Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan lemahnya sistem birokrasi; dan
8. Kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

2.6.5 Perkebunan

Berdasarkan Data Rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 15 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Masing-masing: 9155.9 ton, 1065.9 ton, 2068 ton dan 510.56 ton. Area perkebunan terluas berada di tiga Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Permasalahan Bidang Perkebunan Secara Umum:

1. Luasnya lahan kritis serta penggundulan hutan;
2. Skala usaha bidang perkebunan secara umum masih terbatas;
3. Belum tertatanya kelembagaan petani kebun dan hutan.

2.6.6 Peternakan

2.6.6.1 Populasi Ternak Besar

Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan dari Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun tahun 2006 populasi sapi perah berjumlah 28.716 ekor. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk yang cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Berdasarkan data rekapitulasi, ternak sapi

perah paling banyak terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua. Masing-masing: 17.164 ekor, 6.065 ekor dan 5.058 ekor.

Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di tiga kecamatan dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong. Dari data rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa, populasi ternak sapi potong paling banyak dijumpai di Kecamatan Cikalongwetan yaitu sebesar 6.083 ekor.

Populasi kerbau tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga. Populasi kuda di Kabupaten Bandung Barat tersebar secara merata di 11 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Ngamprah, Cisarua, dan Parongpong.

2.6.6.2 Populasi Ternak Kecil

Ternak domba tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikarenakan ternak domba merupakan komoditi yang mudah beradaptasi dan hidup dimanapun, baik di dataran rendah dan tinggi. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa kecamatan yang merupakan sentra domba diantaranya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang. Masing-masing: 66.649 ekor, 60.213 ekor, dan 35.447 ekor.

Populasi kambing di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kecuali di Kecamatan Cipatat, Cisarua, Ngamprah, Lembang dan Parongpong yang saat ini kontribusi ternaknya masih sangat kecil. Tetapi pemanfaatan daging kambing relatif kurang diminati untuk konsumsi, selama ini produksi ternak kambing dijual keluar Kabupaten Bandung Barat seperti ke Jakarta, Karawang, Bekasi dan daerah lainnya. Sentra populasi kambing untuk tahun 2006 terdapat di Kecamatan Cilililin dan Cipongkor.

2.6.6.3 Populasi Unggas

Penyebaran populasi ayam buras di Kabupaten Bandung Barat cukup merata. Daerah populasi tertinggi terdapat di kecamatan Ngamprah. Kecamatan lainnya yang cukup banyak populasinya antara lain: Lembang,

Cihampelas, Gununghalu, Cipeundeuy, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat dan Batujajar. Sistem peternakan ayam buras merupakan peternakan rakyat dengan sistem pemeliharaan yang diliarikan. Sehingga pada saat terjadi wabah *avian influenza* (Flu burung) tahun 2006, penyebarannya sangat cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan populasi unggas pada tahun 2006.

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, populasi ayam petelur paling banyak berada di Kecamatan Cipatat. Kecamatan lainnya yang populasinya cukup banyak antara lain Kecamatan Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Populasi ayam petelur seperti halnya ayam buras, hasil produksinya tidak sesuai dengan apa yang di targetkan, hal ini dikarenakan serangan penyakit unggas yang ganas sehingga mengakibatkan kematian yang tinggi serta depopulasi unggas yang tinggi pula karena sebagai suatu bentuk kewaspadaan dan antisipasi akan penyebaran penyakit flu Burung terutama pada tahun 2006.

Populasi ayam pedaging di Kabupaten Bandung Barat tersebar merata di 8 Kecamatan, antara lain di Kecamatan: Parongpong, Cikalongwetan, Gununghalu dan Cipongkor, sedangkan di Kecamatan lain masih dapat dikembangkan.

Sedangkan untuk ternak itik, secara umum ternak itik dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Penyebaran populasi itik di Kabupaten Bandung Barat cukup merata. Daerah populasi tertinggi terdapat di kecamatan Cikalong Wetan.

2.6.6.4 Populasi Ternak Berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan data rekapitulasi, jenis ternak yang paling banyak populasinya di 15 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat adalah pertama ternak unggas, kedua ternak kecil dan ketiga ternak besar. Ternak unggas yang paling banyak populasinya adalah ternak ayam buras dan ayam broiler. Sedangkan ternak kecil yang paling banyak populasinya adalah domba. Dan ternak besar yang paling banyak populasinya adalah sapi perah.

Produksi Daging, Telur, dan Susu

Kontribusi daging yang paling banyak memberikan kontribusi di Bandung Barat ada di Kecamatan Lembang dan Cipongkor, masing-masing 1.831.148 ekor dan 1.516.788 ekor. Sedangkan di 13 Kecamatan lainnya menyebar rata produksinya.

Produksi telur paling banyak dihasilkan di Kecamatan Cikalongwetan dan Cipatat, masing-masing: 521.592 kg dan 504.403 kg. Beberapa kecamatan lainnya yang cukup berkontribusi dalam penyediaan telur antara lain: di Kecamatan Cipeundeuy, Cipongkor, Cihampelas, Lembang, Batujajar dan Gununghalu.

Susu paling banyak dihasilkan di Kecamatan Lembang, kontribusinya sebesar 36.334.815 liter. Hal ini dikarenakan kondisi iklim di Lembang yang sangat sesuai untuk perkembangbiakan sapi perah, khususnya di Jawa Barat. Kecamatan lainnya yang menghasilkan produksi sapi perah secara optimal antara lain di Kecamatan Cisarua dan Parongpong. Sehingga dari aspek ketersediaan produksi, jika ingin dikembangkan kawasan agribisnis peternakan terpadu di Kabupaten Bandung Barat ini, 3 kecamatan tersebut sangat tepat jika ingin dikembangkan.

Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pergerakan konsumsi sepanjang tahun 2006 di Kabupaten Bandung Barat cukup baik. Konsumsi paling tinggi yaitu konsumsi susu sebesar 8.93 kg/kap/th, selanjutnya diikuti oleh konsumsi daging 8.38 kg/kap/th. Sedangkan untuk konsumsi telur saat ini masih belum memadai dibandingkan dengan tingkat produksi telur yang ada saat ini.

Potensi Perusahaan Peternakan

Pada Tahun 2006 terdapat sekitar 32 perusahaan yang bergerak pada sub sektor peternakan, yang terdiri dari 5 perusahaan peternakan sapi potong, 6 perusahaan sapi perah. 15 perusahaan ayam ras pedaging, empat perusahaan ayam ras petelur, dan dua perusahaan *breeding farm*.

Potensi Kelembagaan Peternakan

Selain ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai dukungan kelembagaan (koperasi Susu) yang cukup baik, yang memudahkan para peternak menjual produk peternakannya berupa

susu serta mendapatkan sapronak seperti peralatan kandang, peralatan reproduksi, Kesehatan ternak dan sebagainya. Adapun 3 KUD sapi perah di Kabupaten Bandung Barat ada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu: di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong.

Lembaga lain dalam bidang peternakan selain Koperasi juga terdapat kelompok peternak di tingkat desa diantaranya kelompok sapi perah, sapi potong, domba, dan itik.

Permasalahan di bidang peternakan antara lain:

1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit terutama yang bersifat zoonosis,
2. Masalah teknis serta masalah lainnya yang meliputi SDM, teknologi, permodalan dan investasi,
3. Rendahnya kualitas dan keamanan produk,
4. Rendahnya pengembangan kawasan ternak,
5. Masih tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan pencegahannya yang memadai,
6. Rendahnya harga susu, dan
7. Faktor agroklimat yang tidak menentu

2.6.7 Perikanan

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 2 (dua) waduk besar di Jawa Barat yang memiliki potensi besar. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Kecamatan potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy (waduk Cirata) yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA. Selain itu usaha perikanan lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu usaha pembenihan ikan, usaha budidaya ikan pada kolam air tenang, minapadi, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Permasalahan di bidang perikanan antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya ikan (ketersediaan induk/calon induk dan benih ikan unggul, pakan berkualitas, obat-obatan);
2. Rantai tata niaga pemasaran komoditi perikanan yang belum efisien;
3. Penurunan daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan;

4. Meningkatnya intensitas dan kualitas serangan penyakit ikan;
5. Alih fungsi lahan budidaya serta rendahnya akses permodalan.

2.6.8 Wisata

Menurut Dinas Pariwisata Bandung Barat kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan karekteristiknya, objek wisata dapat dikelompokkan menjadi objek Wisata Agro (Tabel 2.13), Wisata Alam (Tabel 2.14), dan Wisata Minat Khusus (Tabel 2.15).

Tabel 2.13. Obyek Wisata Agro

NAMA OBYEK WISATA	KECAMATAN	PENGELOLA	JENIS
Panglejar	Cikalongwetan	PTPN VIII	Perkebunan teh
Cibodas	Lembang	Masyarakat	Pertanian palawija, strawberry

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bandung Barat, 2008.

Tabel 2.144. Obyek Wisata Alam

NAMA OBYEK WISATA	DESA	KECAMATAN	PENGELOLA	JENIS	LUAS (HA)
ZONA BANDUNG UTARA					
Gunung Tangkuban Perahu		Lembang	Perhutani	Alam	370
Bumi Perkemahan Cikole		Lembang	Perhutani	Alam	10
Jaya Giri (lintas hutan)		Lembang	Perhutani	Alam	7
Situ Lembang		Lembang	Perhutani	Alam	74
Maribaya		Lembang	Pemda	Alam	5,5
Peneropongan Bintang Boscha		Lembang	ITB	Budaya	
Curug Omas		Lembang	Perhutani	Alam	5
Yunghun		Lembang	PPA	Budaya	
Penangkaran Buaya	Cikole	Lembang	Swadaya	Alam	
Curug Cimahi		Cisarua	Perhutani	Alam	6
Curug Panganten		Cisarua	Perhutani	Alam	5
Taman Bunga Cihideung		Parongpong	Koperasi	Alam	
ZONA BANDUNG SELATAN					
Bumi Perkemahan Curug Sawer		Cililin	Perhutani	Alam	5
Situs Batu Payung		Cililin			
Situs Mundinglaya		Cililin			
Luewi Karacak	Mukapayung	Cililin	BKPH Cililin	Alam	
Curug Malela		Rongga		Alam	
Curug Cilingga Payung		Rongga	Perhutani	Alam	
Tiga Walilulloh		Cipongkor		Budaya	

Gunung Padang		Sindangkerta	Perhutani	Alam	
ZONA BANDUNG BARAT					
Situ Ciburuy		Padalarang	Pemda	Alam	32
Goa Pawon		Cipatat	PO.Pikidro	Alam	
Air Panas Cisameng		Cipatat		Alam	
Goa Ters. Air Sanghiang Tikoro		Cipatat		Alam	
Waduk Saguling		Cipatat	Perum Tirta Pekindro	Alam	
Curug Jawa		Cipatat			
Goa Walet	Kampung Cipanas, Desa Rajamandala Kulon	Cipatat	BKPH Rajamandala	Alam	
Air Panas Cibaligo	Cibaligo	Ngamprah	Desa	Alam	20
Bumi Perkemahan Sela Gombong		C. Wetan	PTP Pangheotan	Alam	
Perkebunan Teh Panglejar		C. Wetan	PTP XIII	Alam	
Waduk Cirata		Cipeundeuy	Perum Tirta Pekindro	Alam	

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bandung Barat, 2008.

Tabel 2.15. Obyek Wisata Minat Khusus

NAMA OBYEK WISATA	KECAMATAN	DESA	JENIS	IZIN
Gunung Masigit	Cipatat	Citatah	Legenda, Pemandangan	Belum
Gunung Manik	Cipatat	Citatah	Petualangan	Belum
Goa Pawon	Cipatat	Bihbul	Ziarah	Belum
Makam Eyang Rende (Mama Ajengan Zakaria)	Cikalong Wetan	Rende	Ziarah	Belum
Gunung Putri	Cikalong Wetan	Ganjarsari	Ziarah	Belum
Dayeuh Luhur	Cikalong Wetan	Puteran	Ziarah	Belum
Gunung Salem	Cikalong Wetan	Tenjolaut	Ziarah	Belum
Makam Mama Cancang	Cikalong Wetan	Cisomangbarat	Ziarah	Belum

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bandung Barat, 2008.

2.7 Sosial Budaya dan Kependudukan

Dari perspektif sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya, sebagian besar dan konsentrasi penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari kawasan *peri urban* atau *sub urban* sistem perkotaan Bandung Raya dengan *core region*-nya adalah Kota Bandung. Kawasan permukiman utama di Kabupaten Bandung Barat sebagai masyarakat suburban, dalam aktivitas sosial-ekonominya sangat berorientasi pada *core-region* Kota Bandung, baik sebagai pusat pelayanan regional maupun sebagai tempat bekerja. Perumahan-perumahan baru yang berkembang pesat di berbagai tempat di Kabupaten Bandung Barat merupakan tempat-tempat tujuan proses sub urbanisasi di Metropolitan Bandung Raya. Proses sub urbanisasi di Bandung Barat tumbuh akibat tumbuhnya permukiman dan perkembangan kawasan industri.

Permukiman yang tumbuh dalam proses urbanisasi berkembang seiring dengan kedatangan penduduk kelas menengah dan atas (*middle dan upper classes*) yang utamanya datang (berpindah) dari *core region* Kota Bandung yang mencari hunian baru yang lebih terjangkau (lebih murah) serta lebih layak dan nyaman. Ciri masyarakat di kawasan *sub urban* adalah tingginya fenomena menglaju (*commuting*) ke pusat metropolitan (Kota Bandung) sebagai tempat bekerja. Masyarakat di kawasan ini merupakan penduduk berbudaya kota besar dengan dominasi pendatang dari perkotaan. Komunitas masyarakat ini terkonsentrasi pada *cluster-cluster* perumahan formal dengan keragaman ciri utama seperti adanya *gated-community* (cluster eksklusif), kepadatan rendah, prasarana lingkungan binaan yang relatif baik.

Kawasan *sub urban* juga menjadi pilihan utama untuk lokasi industri relokasi atau industri baru, yang khususnya berlokasi di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar. Perkembangan kegiatan industri baru di kawasan ini banyak menyerap tenaga kerja kelas pekerja/buruh strata menengah-bawah (*middle and lower classes*), baik yang berasal dari perdesaan dan perkotaan di Bandung Barat sendiri maupun para pendatang dari luar Bandung Barat. Perkembangan kawasan industri menumbuhkan permukiman dengan ciri masyarakat buruh dan pendatang lainnya yang bekerja di sektor-sektor sistem perkotaan yang menunjang aktivitas permukiman dan industri, termasuk sektor-sektor informal. Budaya masyarakat di lingkungan ini berciri masyarakat transisi perkotaan-perdesaan, biasanya bermukim di kawasan sangat padat di perkotaan atau pinggiran kota dengan prasarana lingkungan binaan yang bercorak perdesaan namun padat, sehingga selalu berpotensi mengarah pada kekumuhan.

Di luar kawasan permukiman *sub urban* metropolitan dan kawasan industri di atas, tersebar kawasan-kawasan berciri perdesaan yang merupakan kawasan terluas dan merupakan kelompok sosial terbesar di Kabupaten Bandung Barat, dengan lapangan usaha utama di bidang-bidang pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk wisata alam dan agrowisata. Ciri budaya masyarakat ini adalah ciri budaya perdesaan yang sudah banyak

terpengaruh unsur-unsur budaya kota mengingat kedekatannya dengan kawasan perkotaan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 adalah 1.534.869 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Lembang (170.439 jiwa) dan penduduk tersedikit di Kecamatan Kecamatan Rongga (59.042 jiwa). Kecamatan Ngamprah adalah kecamatan terpadat (3.894 jiwa/km²) dan Kecamatan Gununghalu adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah (475 jiwa/km²). Secara detail jumlah dan kepadatan penduduk dan kependudukan di Kabupaten Bandung Barat tertera pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		KEPADATAN (JIWA/KM ²)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
		2007	2008	2007	2008	
1	Cililin	86.360	88.478	1.059	1.085	2,45
2	Cihampelas	98.415	100.144	2.111	2.148	1,76
3	Sindangkerta	64.507	66.281	536	551	2,75
4	Gununghalu	74.292	76.394	462	475	2,83
5	Rongga	57.471	59.042	508	522	2,73
6	Cipongkor	84.229	86.610	1.106	1.137	2,83
7	Batujajar	109.451	112.401	1.308	1.343	2,70
8	Lembang	165.786	170.439	1.687	1.757	2,81
9	Parongpong	86.909	89.381	2.003	2.002	2,84
10	Cisarua	63.706	65.499	1.151	1.183	2,81
11	Ngamprah	136.600	140.515	3.785	3.894	2,87
12	Padalarang	151.736	155.802	2.942	3.021	2,68
13	Cipatat	120.282	123.605	958	985	2,76
14	Cipeundeuy	82.044	85.789	810	847	4,56
15	Cikalongwetan	111.450	114.489	994	1.021	2,73
	TOTAL	1.493.238	1.534.869	1.144	1.175	2,79

Sumber: SUSEDA Kabupaten Bandung, 2008.

2.7.1 Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2007 sebanyak 636.641 orang, dengan jumlah yang bekerja sebanyak 527.107 orang dan pencari kerja sebanyak 109.535 orang (Tabel 2.17).

Tabel 2.17. Angkatan Kerja

NO	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA					
		BEKERJA		JUMLAH	MENCARI PEKERJAAN*)		JUMLAH
		LK	PR		LK	PR	
1	Cililin	22.561	3.301	25.862	2.904	585	3.489
2	Cihampelas	24.855	8.271	33.126	4.462	2.712	7.174
3	Sindangkerta	16.899	9.449	26.348	2.362	363	2.726
4	Gununghalu	20.937	5.061	25.997	5.383	3.285	8.669
5	Rongga	17.915	4.967	22.882	5.676	1.951	7.627
6	Cipongkor	19.693	7.299	26.991	853	505	1.357
7	Batujajar	28.827	7.383	36.210	4.392	2.330	6.722
8	Lembang	48.118	17.264	65.382	11.101	5.430	16.530
9	Parongpong	26.702	6.227	32.929	1.592	584	2.176
10	Cisarua	20.674	5.513	26.187	1.685	1.225	2.910
11	Ngamprah	40.319	14.395	54.714	3.905	2.339	6.244
12	Padalarang	43.340	10.108	53.448	857	1.199	2.056
13	Cipatat	29.491	5.743	35.234	8.705	3.554	12.259
14	Cipeundeuy	21.339	1.533	22.871	6.433	2.810	9.244
15	Cikalongwetan	32.784	6.141	38.925	18.008	2.343	20.351
Total		414.453	414.453	112.654	527.107	78.318	109.534

*) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)
Keterangan: LK (laki-laki), PR (Perempuan)

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Struktur ketenagakerjaan, pada Tahun 2007 menunjukkan sektor pertanian masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Dari 527.106 orang angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat, yang bekerja di sektor pertanian 180.063 orang (34,16%), di sektor perdagangan 88.207 orang (16,73%), di sektor industri 78,999 orang (14,99%), di sektor jasa 100.307 orang (19,03%) dan sektor lainnya sebesar 79,525 orang (15,09 %) tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi, dan lain-lain (SUSEDA 2007). Tampak pada tahun 2007 bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Mayoritas kecamatan mempunyai proporsi terbesar

tenaga kerja yang berkerja di sektor pertanian. Namun ada beberapa kecamatan yang mempunyai proporsi tenaga kerja yang lebih banyak bekerja di sektor lainnya seperti Kecamatan Batujajar, Padalarang, Ngamprah yang mayoritas bekerja di sektor industri. Beberapa kecamatan juga mempunyai proporsi tenaga kerja perdagangan yang cukup besar antara lain Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Padalarang. Lebih jelas mengenai struktur ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.18. Selengkapnya lihat Lampiran 1.

Tabel 2.18. Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha

N O	KECAMATAN	JUMLAH LAPANGAN USAHA					JUMLAH
		PERTANIAN	INDUSTRI	PERDAGANGAN	JASA	LAINNYA	
1	Cililin	11.597	3.334	4.251	4.036	2.644	25.862
2	Cihampelas	7.339	8.660	7.186	3.947	5.994	33.126
3	Sindangkerta	15.055	1.197	3.251	3.252	3.592	26.348
4	Gununghalu	10.078	2.445	3.756	4.243	5.475	25.997
5	Rongga	16.258	483	2.110	2.973	1.058	22.882
6	Cipongkor	12.919	1.432	5.042	4.054	3.544	26.991
7	Batujajar	7.137	10.625	5.980	8.580	3.887	36.210
8	Lembang	18.212	3.612	10.797	12.969	19.792	65.382
9	Parongpong	8.869	1.500	6.986	9.884	5.691	32.929
10	Cisarua	18.140	390	4.747	2.450	459	26.187
11	Ngamprah	9.481	21.482	7.883	8.831	7.036	54.714
12	Padalarang	7.849	14.337	12.435	8.856	9.970	53.448
13	Cipatat	13.773	4.787	5.077	7.057	4.539	35.234
14	Cipeundeuy	10.409	256	2.985	7.282	1.939	22.871
15	Cikalongwet an	12.947	4.459	5.710	11.893	3.905	38.925
TOTAL		180.063	79.000	88.210	100.308	79.525	527.107

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

2.7.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, terdiri dari tiga variabel, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Capaian angka IPM per-kecamatan di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun tertera pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahun di masing-masing kecamatan yang berarti kinerja pembangunan menunjukkan perubahan.

Tabel 2.19. Capaian IPM per Kecamatan Tahun 2003-2007

NO.	KECAMATAN	IPM 2003	IPM 2004	IPM 2005	IPM 2006	IPM 2007
1	Cililin	66,67	67,20	68,97	69,65	70,45
2	Cihampelas	66,67	67,29	68,64	69,43	70,27
3	Sindangkerta	64,87	65,24	66,55	67,00	67,55
4	Gununghalu	63,61	64,16	65,57	66,30	67,15
5	Rongga	60,37	60,80	61,30	62,16	63,36
6	Cipongkor	60,82	61,39	62,12	62,54	64,43
7	Batujajar	65,24	65,71	67,23	68,01	68,87
8	Lembang	68,35	69,11	70,85	71,37	72,67
9	Parongpong	67,77	68,25	69,15	70,01	71,22
10	Cisarua	64,41	65,17	65,76	66,40	67,20
11	Ngamprah	65,37	65,88	67,42	68,10	69,72
12	Padalarang	66,89	67,52	68,32	68,91	70,83
13	Cipatat	64,88	65,65	66,88	67,74	68,51
14	Cipeundeuy	65,54	66,08	66,63	66,81	67,61
15	Cikalongwetan	65,77	66,88	67,50	68,05	68,73

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Perkembangan pendidikan, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik secara langsung akan menyumbang kepada produktivitas. Pembangunan manusia yang belum optimal diharapkan tidak terlalu menghalangi kemajuan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia adalah tujuan akhir dan kegagalan untuk memenuhinya dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik dengan konsekuensi yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari komponen pendidikan pada tahun 2007, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 98,25 dan 8,12, secara rata-rata masyarakat di Kabupaten Bandung Barat umumnya sudah dapat menyelesaikan tingkat pendidikan hingga sekolah dasar dan masih perlu peningkatan kemajuan pendidikan hingga minimal melampaui masa wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007

NO	KECAMATAN	KOMPONEN KESEHATAN		KOMPONEN PENDIDIKAN			KOMPONEN DAYA BELI		IPM	RANGKING IPM
		AHH	INDEKS	ANGKA MELEK HURUF	RATA2 LAMA SEKOLAH	INDEKS	PPP	INDEKS		
1	Cililin	66,80	69,67	99,60	9,02	86,44	539,07	55,25	70.45	4
2	Cihampelas	66,29	68,82	99,89	8,99	86,57	539,78	55,41	70.27	5
3	Sindangkerta	64,70	66,17	98,94	7,76	83,20	530,61	53,29	67.55	11
4	Gununghalu	62,88	63,13	97,08	7,38	81,12	547,45	57,18	67.15	13
5	Rongga	61,00	60,00	94,37	5,96	76,16	533,30	53,92	63.36	15
6	Cipongkor	58,07	55,12	99,54	6,35	80,47	549,65	57,69	64.43	14
7	Batujajar	64,30	65,50	98,50	9,05	85,78	539,43	55,33	68.87	7
8	Lembang	67,22	70,37	99,88	8,76	86,06	566,43	61,57	72.67	1

9	Parongpong	68,71	72,85	98,54	8,38	84,32	544,40	56,48	71.22	2
10	Ciarua	64,53	65,88	95,94	8,16	82,09	532,01	53,62	67.20	12
11	Ngamprah	62,64	62,73	99,23	9,76	87,84	553,53	58,59	69.72	6
12	Padalarang	64,32	65,53	99,95	8,60	85,75	564,85	61,20	70.83	3
13	Cipatat	64,17	65,28	97,27	7,50	81,51	554,09	58,72	68.51	9
14	Cipeundeuy	64,44	65,73	98,07	7,84	82,80	534,90	54,28	67.61	10
15	Cikalongwetan	66,10	68,50	97,45	6,92	80,34	548,19	57,36	68.73	8
Total		66,56	69,27	98,25	8,12	83,54	547,64	57,23	70,01	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2007

Banyak anggapan, bisa baca tulis adalah untuk bekerja. Sehingga perlu disusun intervensi strategi dalam menaikkan kualitas SDM ini dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang tak kalah pentingnya dibandingkan kebutuhan lainnya, bahkan dalam institusi terkecil seperti rumahtangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama.

Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda, tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun. Intervensi strategi dalam menaikkan SDM ini yaitu dengan program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu dipacu disamping terus dijalankan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti program paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional untuk yang putus sekolah bagi usia 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2007, dari 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 5 Kecamatan memiliki angka IPM di atas angka IPM rata-rata Kabupaten Bandung Barat. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, ada 2 Kecamatan yang memiliki angka IPM nya diatas Kabupaten Bandung Barat, artinya di Kabupaten Bandung Barat masih terdapat sekitar 10 kecamatan yang angka pencapaian IPMnya masih di bawah rata-rata IPM Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kemajuan pencapaian angka IPM di Kabupaten Bandung Barat masih belum begitu menggembirakan.

IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 di tiap kecamatan rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, IPM tertinggi yaitu sebesar 72,67 pada Kecamatan Lembang, sedangkan IPM terendah pada kecamatan Rongga yaitu sebesar 63,36. Pencapaian target rata-rata IPM kabupaten sebesar 75

pada Tahun 2013. IPM Kecamatan Lembang meningkat sebesar 1.30 point dari 71.37 pada Tahun 2006 menjadi 72.67 pada Tahun 2007, sedangkan Kecamatan Rongga meningkat sebesar 1.20 point dari 62,16 Tahun 2006 menjadi 63.36 Tahun 2007.

Jika melihat disparitas IPM tiap kecamatan, rentang antara IPM kecamatan tertinggi 72,67 dengan kecamatan terendah 63,36 poin pada Tahun 2007 menunjukkan semakin besar disparitas pencapaian angka IPM antar kecamatan kesenjangan pembangunan antar kecamatan semakin melebar, terutama pada kecamatan yang dianggap berhasil kemajuan pembangunan manusianya dengan kecamatan yang masih tergolong tertinggal. Kesenjangan antar kecamatan lebih terlihat pada pola antar daerah.

Daerah yang bercorak urban seperti Kecamatan: Cililin, Cihampelas, Lembang, Parongpong dan Padalarang pada umumnya memiliki IPM cukup tinggi. Sementara daerah yang berkarakter pedesaan (rural), seperti Kecamatan Gununghalu, Rongga, Cipongkor, Batujajar, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cikalong Wetan dan Kecamatan Cipeundeuy memiliki angka IPM yang relatif rendah. Antara kota dan desa hingga kini masih diwarnai dikotomi pada proses dan distribusi hasil-hasil pembangunan.

Pada tahun 2007 indeks kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebesar 69,27 lebih kecil dari indeks kesehatan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 71,03. Selanjutnya dilihat dari kontribusi indeks daya beli (*purchasing power parity*) menunjukkan indeks daya beli Provinsi Jawa Barat lebih besar 2.90 poin dibanding dengan Kabupaten Bandung Barat (60,13 Prov. Jabar – 57,23 KBB), hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat masih di bawah rata-ratan daya beli rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat.

Indeks Pendidikan dalam perhitungan IPM dihitung dari dua pertiga komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Indeks pendidikan Kabupaten Bandung Barat lebih tinggi 2,41 poin yang ditunjang oleh indeks RLS sebesar 8,12 dan indeks AMH sebesar 98,25.

2.7.3 Pendidikan

Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, banyak penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang tidak lagi bersekolah karena sudah lulus atau putus sekolah. Kecamatan Ngamprah adalah kecamatan dengan persentase penduduk tidak lagi bersekolah tertinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21

Tabel 2.21. Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas

NO	KECAMATAN	TDK/BLM	MASIH	TIDAK LAGI
1	Cililin	792	12.105	58.611
2	Cihampelas	1.121	15.099	62.660
3	Sindangkerta	723	10.351	40.705
4	Gununghalu	1.188	8.912	53.943
5	Rongga	1.434	7.445	36.535
6	Cipongkor	1.907	12.927	51.398
7	Batujajar	1.325	15.445	73.062
8	Lembang	1.761	22.266	110.115
9	Parongpong	886	8.735	58.436
10	Cisarua	295	8.738	43.862
11	Ngamprah	643	21.453	89.834
12	Padalarang	850	18.275	104.249
13	Cipatat	3.920	18.960	75.617
14	Cipeundeuy	766	15.317	53.657
15	Cikalongwetan	662	12.397	76.152
TOTAL		18.271	208.426	988.834

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Ijazah tertinggi mayoritas penduduk berusia di atas 10 tahun di Kabupaten Bandung Barat adalah SD (54,35 %). Kecamatan Cipongkor adalah kecamatan dengan persentase jumlah penduduk berijazah tertinggi SD terbanyak (71,62 %) dan jumlah penduduk dengan ijazah PT (perguruan tinggi) yang terendah. Kecamatan Parongpong adalah kecamatan dengan persentase jumlah penduduk berijazah PT terbanyak; sedangkan Kecamatan Gununghalu adalah kecamatan dengan persentase jumlah penduduk paling sedikit. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22. Ijazah Tertinggi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas

NO	KECAMATAN	TDK/BLM	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Cililin	14.008	40.847	10.016	6.190	446

2	Cihampelas	13.074	35.896	18.576	10.011	1.324
3	Sindangkerta	7.366	28.380	12.530	2.767	736
4	Gununghalu	11.073	35.214	11.392	5.871	493
5	Rongga	15.735	21.496	5.322	2.566	294
6	Cipongkor	9.171	43.072	8.387	4.716	887
7	Batujajar	12.806	43.998	21.376	10.641	1.011
8	Lembang	26.290	57.500	21.418	21.311	7.622
9	Parongpong	14.922	34.176	10.680	5.809	2.470
10	Cisarua	17.978	26.320	6.415	1.872	309
11	Ngamprah	15.429	31.590	29.618	31.371	3.924
12	Padalarang	7.286	51.310	22.882	36.083	5.813
13	Cipatat	23.104	48.968	19.218	5.700	1.506
14	Cipeundeuy	17.574	33.266	14.788	3.891	221
15	Cikalongwetan	19.080	48.889	12.513	7.504	1.226
TOTAL		224.896	580.922	225.131	156.302	28.280

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

Hampir semua unit sekolah per tingkat menyebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Rongga yang tidak memiliki SLTA. Jumlah SD adalah jenis sekolah terbanyak dibandingkan dengan yang lainnya (703) dengan Kecamatan Lembang sebagai kecamatan dengan jumlah SD terbanyak (Tabel 2.23).

Tabel 2.23. Jumlah Unit Sekolah

NO	KECAMATAN	TK	SD	SLTP	SLTA	RA	MI	MTS	MA
1	Cililin	2	40	11	6	14	15	7	5
2	Cihampelas	1	45	5	2	18	16	7	3
3	Sindangkerta	3	42	6	3	10	11	4	2
4	Gununghalu	1	36	3	1	12	21	4	3
5	Rongga	1	35	2	0	3	6	1	-
6	Cipongkor	2	49	4	3	7	23	5	2
7	Batujajar	7	53	5	2	21	12	13	4
8	Lembang	18	66	8	5	18	3	4	-
9	Parongpong	4	36	4	1	11	3	1	1
10	Cisarua	2	28	2	2	6	4	3	3
11	Ngamprah	28	45	6	1	14	2	2	-
12	Padalarang	12	65	8	2	18	12	4	4
13	Cipatat	3	59	4	1	15	9	5	2
14	Cipeundeuy	3	44	5	3	3	12	4	2
15	Cikalongwetan	5	60	7	2	6	7	8	4
TOTAL		92	703	80	34	176	156	72	35

Sumber: Bandung Dalam Angka 2006 & Data Statistik Raudhatul Athfal Kandepag Kab. Bandung Barat Tahun Pelajaran 2008/2009

Dari sisi kemampuan membaca, mayoritas penduduk di Kabupaten Bandung Barat mampu membaca huruf latin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24

Tabel 2.24. Kemampuan Membaca

NO	KECAMATAN	HURUF LATIN	HURUF LAINNYA	TIDAK DPT
1	Cililin	37.762	205	1.759
2	Cihampelas	53.422	956	782
3	Sindangkerta	6.174	1.443	914
4	Gununghalu	22.160	3.206	1.833
5	Rongga	24.123	-	4.279
6	Cipongkor	56.145	174	2.074
7	Batujajar	80.828	-	3.758
8	Lembang	49.844	1.577	4.613
9	Parongpong	20.429	706	1.913
10	Cisarua	40.953	295	1.068
11	Ngamprah	36.050	2.924	4.015
12	Padalarang	102.855	-	850
13	Cipatat	81.481	547	4.603
14	Cipeundeuy	57.785	-	1.481
15	Cikalongwetan	42.837	765	662
TOTAL		712.848	12.797	34.604

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

2.7.4 Kesehatan

Kabupaten Bandung Barat belum memiliki fasilitas rumah sakit kecuali rumah sakit swasta di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang. Dengan tidak tersedianya rumah sakit khususnya milik pemerintah, warga yang membutuhkan perawatan harus merujuk ke rumah sakit di Kota Cimahi atau di Kota Bandung. Fasilitas kesehatan yang tersebar merata di tiap kecamatan adalah puskesmas (termasuk puskesmas pembantu). Rumah sakit bersalin hanya berada di beberapa kecamatan saja seperti Kecamatan Batujajar, Lembang, Parongpong, dan Padalarang.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan lainnya sudah cukup tersebar di seluruh kecamatan, walaupun secara kuantitas masih terlihat kurang. Poliklinik banyak terdapat di Kecamatan Padalarang. Apotik memusat di Kecamatan Ngamprah dan tidak ada di beberapa kecamatan. Praktik dokter di Kecamatan

Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, dan Cipongkor juga kurang dari cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. Jumlah Sarana Kesehatan (unit)

NO	KECAMATAN	R.S BERSALIN	POLIKLINIK	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	PRAKTIK DOKTER	PRKATIK BIDAN	APOTIK
1	Cililin	0	0	1	3	6	15	5
2	Cihampelas	0	0	0	4	7	13	0
3	Sindangkerta	0	6	2	5	1	14	0
4	Gununghalu	0	0	1	5	1	5	0
5	Rongga	0	7	1	2	1	4	0
6	Cipongkor	0	0	2	0	2	11	0
7	Batujajar	2	6	1	4	10	15	2
8	Lembang	3	4	4	2	29	32	4
9	Parongpong	2	4	2	3	15	10	2
10	Cisarua	0	3	1	6	8	11	0
11	Ngamprah	0	1	2	2	12	25	15
12	Padalarang	5	14	4	3	17	20	2
13	Cipatat	0	5	4	4	6	10	1
14	Cipeundeuy	0	5	2	7	4	9	1
15	Cikalongwetan	0	5	2	3	4	6	4
TOTAL		12	60	29	53	123	200	36

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.7.5 Kesejahteraan

Di Kabupaten Bandung Barat, masih cukup banyak kecamatan dengan persentase jumlah penduduk pra-KS dan KS 1 yang tinggi. Beberapa kecamatan yang mempunyai persentase yang relatif rendah adalah Kecamatan Parongpong dan Padalarang. Semakin tinggi persentase keluarga pra-KS dan KS 1 di suatu kecamatan, semakin tinggi persentase penduduk yang tidak sejahtera. Kesejahteraan penduduk inilah yang merupakan salah satu penanda tinggi/rendahnya daya belinya (Tabel 2.26.)

Tabel 2.26. Persentase Keluarga Pra KS dan KS 1

NO	KECAMATAN	% KELUARGA PRA-KS & KS 1
1	Cililin	53.96
2	Cihampelas	51.19
3	Sindangkerta	50.81
4	Gununghalu	21.57
5	Rongga	36.99
6	Cipongkor	56.29
7	Batujajar	30.27
8	Lembang	25.74

9	Parongpong	11.90
10	Cisarua	31.32
11	Ngamprah	22.53
12	Padalarang	14.01
13	Cipatat	29.40
14	Cipeundeuy	46.07
15	Cikalongwetan	64.76

Sumber: PODES BPS Pusat, 2006

2.8 Sarana dan Prasarana Daerah

2.8.1 Tata Ruang

Tinjauan tata ruang merujuk pada Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bandung Barat 2008-2028. Tinjauan ini terdiri dari kebijakan pengembangan Metropolitan Bandung, konsep pendekatan pengembangan wilayah, konsep rencana struktur ruang, konsep rencana pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis:

2.8.1.1 Kebijakan Pengembangan Metropolitan Bandung

Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan:

1. Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai PKN
2. Kawasan Cekungan Bandung sebagai Kawasan Andalan, dengan sektor unggulan sektor industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan
3. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai Kawasan Strategis Nasional

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, Kawasan Metropolitan Bandung merupakan pusat pengembangan utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dikembangkan dengan dengan kegiatan utama pengembangan:

1. Sumberdaya manusia,
2. Jasa,
3. Agribisnis,
4. Pariwisata, dan
5. Industri

2.8.1.2 Konsep Pendekatan Pengembangan Wilayah

Dalam pengembangan tata ruang Kabupaten Bandung Barat digunakan beberapa konsep pendekatan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Kabupaten Bandung Barat saat ini menghadapi ketimpangan pembangunan antara wilayah tengah dan selatan. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan prasarana sarana dan proporsi kawasan terbangun serta aksesibilitas kawasan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Bandung Barat jangka panjang seharusnya diarahkan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah ini melalui upaya-upaya menciptakan pemerataan dan keberimbangan pembangunan antar kawasan yang lebih proporsional. Pemerataan pembangunan yang dimaksud bukan berarti terwujudnya kesamaan tingkat pembangunan dan struktur perekonomian di semua wilayah. Pembangunan antar kawasan yang berimbang (*balance development*) yang diharapkan adalah berkembangnya setiap kawasan sesuai dengan potensi serta terwujudnya keterkaitan pembangunan antar kawasan yang saling memperkuat/bersinergi secara proporsional.

2. Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian

Pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat di masa mendatang harus mempertimbangkan karakteristik/potensi serta daya dukung lingkungannya. Kesuburan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Wilayah Utara yang juga dicirikan dengan keberadaan jaringan irigasi teknis yang cukup baik. Dengan demikian pengembangan kawasan-kawasan lahan kering dan lahan basah sebagai kawasan budidaya pertanian perlu mengembangkan sistem tata air yang baik dengan bahan-bahan yang mengandung mineral yang dibutuhkan tanaman. Disamping itu kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Bandung Barat juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan tanaman hias serta tanaman obat-obatan.

Salah satu modal pengembangan wilayah berbasis pertanian adalah pengembangan agropolitan. Potensi sumberdaya pertanian Kabupaten Bandung Barat yang besar, memungkinkan dikembangkannya kawasan-

kawasan agropolitan yang disertai pusat-pusat kegiatan permukiman (*urban function centres*) atau kota-kota kecil pertanian/agropolis (kecamatan di bagian utara) dengan penekanan pada tanaman pangan dan perkebunan.

3. Keterpaduan Antar Moda Transportasi

Wilayah Kabupaten Bandung Barat mempunyai moda transportasi darat. Moda transportasi darat terutama terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Moda transportasi darat yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari angkutan umum (angkot), bis dan kereta api.

2.8.1.3 Konsep Rencana Struktur Ruang

Konsep rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat primer untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (Pusat Primer Ngamprah).
2. Membagi wilayah kabupaten menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu di WP Padalarang-Ngamprah, WP Cililin, WP Lembang, dan WP Cikalongwetan.
3. Mengembangkan sistem pusat Desa Pusat Pertumbuhan secara seimbang/ proporsional sesuai pembagian jenjang pelayanannya.
4. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di sekitar kota Bandung Barat, yaitu pada pusat-pusat WP yang akan dikembangkan: Ngamprah-Padalarang sebagai pusat utama Kabupaten Bandung Barat yang didukung oleh kota hirarki yang lebih kecil. Pusat-pusat ini harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk mengalihkan pemusatan pergerakan ke kota inti.
5. Pengembangan sistem transportasi terutama diarahkan untuk menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang sesuai dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder, pada pembentukan struktur jaringan jalan dengan pola ring-radial, sehingga pusat-pusat WP yang akan terbentuk saling dihubungkan dengan jaringan jalan tersebut.

2.8.1.4 Konsep Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

A. Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung yang meliputi luas 48.334,40 ha (36,95%) diarahkan dengan mengembangkan kawasan lindung yang telah ditetapkan, dan kawasan-kawasan lain yang dapat berfungsi lindung (pertanian, perkebunan), serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung.

Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan dengan mempertahankan dan memfungsikan kembali kawasan resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi. Untuk kawasan perlindungan setempat, pengembangannya adalah dengan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi lahan, serta mengembangkan kawasan yang potensial sebagai jalur hijau, terutama sempadan sungai. Sementara Untuk kawasan pelestarian alam, pengembangannya adalah dengan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi lahan.

B. Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan non pertanian yang meliputi luas 80.778,15 ha (61,86%) diupayakan melalui pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW, dan mendorong pengembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW. Pengembangan kawasan budidaya ini meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Perumahan dan permukiman diarahkan untuk:
 - a. Membatasi pengembangan kawasan perumahan di bagian utara dan selatan di kawasan yang berfungsi lindung. Pembatasan dalam hal luas lahan perumahan, maupun besaran KLB pada setiap kavling rumah.
 - a. Membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 60% dari luas lahan yang sesuai untuk perumahan,
 - b. Mengembangkan perumahan secara vertikal di kawasan padat penduduk diantaranya Padalarang, Ngamprah, Batujajar, dan Cihampelas serta kecamatan-kecamatan lain yang padat penduduk, meliputi rumah susun 4 lantai, apartemen 8 lantai dan apartemen lebih dari 8 lantai.

- c. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dan diarahkan untuk dikembangkan menjadi rumah susun sederhana.
2. Pengembangan Kawasan Jasa Pemerintahan adalah kawasan pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu di Ngamprah.
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - a. Pengembangan pasar dilakukan melalui: (1) Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang mengganggu lalu lintas yang diintegrasikan dengan keberadaan terminal serta fasilitas penduduk lainnya, dan (2) Merelokasi pasar bila tidak didukung prasarana memadai.
 - b. Pengembangan pusat belanja dan jasa dilakukan melalui: (1) Mengarahkan pengembangan pusat belanja dan jasa terutama di pusat Ngamprah, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat ke Kota Bandung. (2) Kemudian diikuti pengembangan pusat belanja dan jasa hirarki lebih rendah di setiap pusat WP.
4. Pengembangan Kawasan Industri
 Pengembangan industri ringan (pengolahan makanan, dan garmen), dan industri rumah tangga yang tidak boros air, dipertahankan di kawasan industri yang telah ada saat ini, yaitu di Padalarang, serta rencana pengembangan di Cipeundeuy.
5. Pengembangan Kawasan Pertanian
 Pengembangan kawasan pertanian diarahkan terutama terkait dengan daya dukungnya sebagai kawasan pertanian, yaitu :
 - a. Pengembangan Pertanian Tanaman Lahan Basah diarahkan pada sawah-sawah yang telah ada saat ini, terutama yang didukung oleh prasarana irigasi. Rencana alih fungsi lahan sawah harus diikuti dengan pencetakan lahan sawah seluas paling sedikit lahan yang dialih fungsikan, yang lokasinya sesuai untuk kesesuaian lahan sawah dan didukung prasarana irigasi. Lahan yang sesuai untuk sawah terdapat di Cililin, Cihampelas, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan.
 - b. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering diarahkan pada lahan-lahan yang saat ini telah berkembang, dan dilakukan pembatasan kawasan terbangun, yaitu di Lembang, Parongpong,

- Cisarua, Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, Batujajar, dan Rongga.
- c. Pengembangan Pertanian Tanaman Tahunan (Perkebunan) dapat digolongkan sebagai kawasan budidaya fungsi lindung, sehingga luasannya dipertahankan tidak berkurang, yaitu pada kawasan perkebunan yang telah ada saat ini (Cikalongwetan, Cipeundeuy, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga).
 - d. Pengembangan Kawasan Perikanan Darat diarahkan di Cipeundeuy, Gunung Halu, dan Cipatat (selain 2 waduk).
 - e. Pengembangan Kawasan Peternakan diarahkan di Lembang, Cisarua, Parongpong, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Gununghalu, Rongga, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Cihampelas, dan Batujajar.
6. Pengembangan Kawasan Hutan

Pengembangan kawasan hutan terutama terkait dengan fungsi konservasi yang juga dapat dimanfaatkan fungsi ekonominya yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat. Seperti halnya kawasan perkebunan, maka kawasan-kawasan hutan ini akan menjadi kawasan pelindung hutan lindung dari kemungkinan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan akan sangat dibatasi untuk mempertahankan fungsi lindungnya.

7. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pariwisata yang akan dikembangkan terutama pariwisata alam, yaitu di Lembang, Parogpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipatat, Cililin, Rongga, Gununghalu, serta kawasan Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Serta lokasi lain yang mempunyai potensi dikembangkan sebagai pariwisata alami. Selain itu dikembangkan pula pariwisata buatan/pariwisata terpadu.

2.8.1.5 Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan-ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi pengembangan Kabupaten Bandung Barat dan wilayah regional Metropolitan Bandung. Kawasan strategis yang didorong perkembangannya adalah:

1. Kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk mendorong perkembangan Wilayah Metropolitan Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pengembangan kawasan ini akan memiliki dampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional
2. Kawasan strategis cepat tumbuh, yaitu kawasan yang telah memiliki potensi cepat tumbuh berkembang dan apabila didorong perkembangannya kawasan tersebut akan tumbuh dengan pesat.
3. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial ekonomi.
4. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Kawasan budidaya strategis di Kabupaten Bandung Barat yang perlu segera didorong perkembangannya meliputi:

1. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Ngamprah;
2. Kawasan Terpadu Cikalongwetan dengan rencana kegiatan meliputi :
 - a. Konvensi dan eksibisi
 - b. Rekreasi modern
 - c. Hotel dan komersial
 - d. Kampung Asia Afrika (*Asia-Africa Village*)
 - e. Wisata rohani
 - f. Perumahan dan Permukiman
3. Kawasan Relokasi Industri Cipeundeuy :
 - a. Sarana/prasarana kawasan industri
 - b. Permukiman skala besar
 - c. IPAL industri dan domestik
 - d. TPA regional

Kawasan lindung strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan lindung strategis ini menjadi prioritas pengendalian mengingat apabila tidak segera dilakukan pengendalian akan rawan terhadap bencana dan hilangnya potensi konservasi alam/budaya. Kawasan Lindung strategis Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Kawasan Bandung Utara
2. Kawasan Waduk Saguling dan Cirata

3. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan Peneropongan Bintang Bosscha.

2.8.2 Infrastruktur Dasar

2.8.2.1 Sumber Air Minum

Kebanyakan penduduk di Kabupaten Bandung Barat mengambil air minum dari sumur terlindung (112.215 rumah tangga). Sumber air minum terbanyak kedua adalah dari mata air terlindung. Penggunaan ledeng (PDAM) relatif masih sedikit.

2.8.2.2 Jaringan Irigasi

Daerah Irigasi (DI) yang ada di Bandung Barat memiliki luas areal 30.651 Ha terdiri dari:

1. Daerah Irigasi Teknis 4.590 Ha
2. Daerah Irigasi Semi Teknis 432 Ha
3. Daerah Irigasi Sederhana 234 Ha
4. Daerah Irigasi Pedesaan 21.337 Ha
5. Daerah Irigasi Tadah Hujan 4.058 Ha

Menurut RKPD Kabupaten Bandung Barat 2007-2008, pada tahun 2007, kondisi jaringan irigasi, Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Bandung Barat dengan luas pelayanan antara 1.000 sampai dengan 3.000 ha, memiliki bangunan sadap/bagi sebanyak 36 buah dengan kondisi baik sebanyak 8 buah, kondisi rusak ringan sebanyak 12 buah dan kondisi rusak berat sebanyak 16 buah. Selain itu juga memiliki bangunan pelengkap sebanyak 17 buah dengan kondisi baik sebanyak 4 buah, kondisi rusak ringan sebanyak 4 buah dan kondisi rusak berat sebanyak 9 buah.

Irigasi yang dikelola oleh masyarakat terdiri dari irigasi pedesaan dengan luas areal 22.949 ha dan memiliki bangunan bendung sebanyak 422 buah terdiri dari 174 buah dengan kondisi baik, 112 buah dengan kondisi rusak ringan dan 136 buah dengan kondisi rusak berat. Sedangkan untuk

bangunan sadap/bagi sebanyak 237 buah dengan kondisi baik sebanyak 140 buah, kondisi rusak ringan (126 buah) dan kondisi rusak berat (96 buah).

2.8.2.3 Sumber Daya Air

Kondisi pengelolaan sumberdaya air, dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan situ serta perbaikan dan pemeliharaan sungai di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2007, telah terlaksana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ Kewenangan Kabupaten Bandung Barat di 3 situ, 2 waduk, dan 2 bendungan (Tabel 2.27).

Wilayah perkotaan yang sudah terlayani PDAM adalah sebagian Kecamatan Padalarang, Batujajar, Ngamprah, Cililin, Cikalongwetan, Lembang, Cisarua, dan Parongpong. Sedangkan wilayah cakupan penyediaan air bersih yang termasuk perdesaan adalah sebagian Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Rongga, Cipeundeuy, dan Kecamatan Cihampelas. Untuk wilayah perdesaan, sumber air berasal dari mata air, sumur dangkal dan sumur bor dengan sistem distribusinya menggunakan pompa atau pipa gravitasi. Dari total keseluruhan sarana yang digunakan oleh masyarakat dalam penyediaan airnya adalah dengan sambungan langsung kerumah, hidran umum atau dengan terminal air.

Adapun daerah tangkapan air yang menjadi penyedia air tanah maupun air permukaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah; Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang). Sumber mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data dari PDAM Tirt Raharja, mencapai 223 lokasi yang tersebar di 12 kecamatan, dengan debit dari 3 samapi 500 liter / detik.

Tabel 2.27. Sumber Air Minum (rumah tangga)

KECAMATAN	AIR KEMASAN	LEDENG	POMPA	SUMUR TERLINDUNG	SUMUR TAK TERLINDUNG	MATA AIR TERLINDUNG	MATA AIR TAK TERLINDUNG	AIR SUNGAI	AIR HUJAN	LAINNYA
Cililin	-	287	716	8.798	3.315	6.482	2.249	409	-	-

Cihampelas	1.408	-	3.205	16.790	2.373	146	146	-	-	-
Sindangkerta	-	-	193	7.334	1.351	1.351	6.948	-	-	-
Gununghalu	-	987	164	7.425	4.524	5.427	3.137	-	164	164
Rongga	-	-	169	8.606	3.375	844	3.037	-	-	169
Cipongkor	-	-	526	18.292	701	2.454	351	-	-	-
Batujajar	5.299	418	6.294	13.577	2.070	697	-	-	-	-
Lembang	410	7.247	5.106	11.631	-	17.298	1.110	-	-	486
Parongpong	137	586	4.271	412	-	17.432	-	-	-	-
Cisarua	170	341	-	-	-	15.345	3.239	-	-	-
Ngamprah	134	4.345	6.890	13.499	802	9.838	935	-	-	-
Padalarang	-	6.214	5.577	5.577	10.466	3.665	7.330	-	-	159
Cipatat	-	-	1.392	9.155	7.468	9.994	2.361	-	-	-
Cipeundeuy	-	-	-	3.735	16.773	-	1.419	-	-	-
Cikalongweta n	-	9.640	549	12.653	1.613	3.952	906	-	-	-
TOTAL	7.55 9	30.06 4	35.05 3	137.48 3	54.83 0	94.92 5	33.16 8	409	164	97 9

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

2.8.2.4 Persampahan

Pelayanan kebersihan di Kabupaten Bandung Barat sampai saat ini masih belum optimal, mengingat belum seluruh wilayah terlayani oleh Dinas Pekerjaan Umum, terutama untuk wilayah perdesaan, sebagaimana tertera pada Tabel 2.28.

Dari Tabel 2.28 dapat dilihat bahwa dari 15 kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum baru bisa melayani 5 kecamatan, dengan sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) $\pm 243,88 \text{ m}^3$ perhari, padahal berdasarkan data Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2006, jumlah timbulan sampah per hari di Kabupaten Bandung Barat adalah $\pm 2,744 \text{ m}^3$ perhari. Artinya jumlah sampah yang terangkut ke TPSA di Kabupaten Bandung baru mencapai 8,79%, sisanya bisa dibuang ke sungai, ditimbun atau dibakar oleh masyarakat. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Masih besarnya prosentase timbulan sampah tidak terangkut, beban pemerintah di dalam mengatasi permasalahan sampah tentunya akan sangat berat tanpa dibantu oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mengatasi permasalahan sampah. Di samping itu rekayasa sosial yang mengarah kepada peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah, dengan demikian upaya mengurangi jumlah timbulan sampah yang harus diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) dan TPSA

bisa dikurangi di level rumah tangga sebagai unit terkecil di masyarakat. Rekayasa teknologi pengolahan sampah yang aman bagi lingkungan yang mampu mengurangi jumlah timbulan sampah TPSS dan TPSA juga perlu dilakukan sehingga kesulitan mencari lahan TPSS dan TPSA bisa teratasi.

Tabel 2.28. Pelayanan Kebersihan

NO	KECAMATAN	TERLAYANI/TIDAK *)	SAMPAH TERANGKUT (M ³ /HARI)
1	Cihampelas	-	-
2	Cipongkor	-	-
3	Cililin	-	-
4	Gununghalu	-	-
5	Rongga	-	-
6	Sindangkerta	-	-
7	Padalarang	√	104.06
8	Ngamprah	√	47.94
9	Batujajar	√	47.74
10	Lembang	√	39.34
11	Parongpong	√	4.80
12	Cikalongwetan	-	-
13	Cipeundeuy	-	-
14	Cisarua	-	-
15	Cipatat	-	-

(* Keterangan: √: terlayani dan -: tidak terlayani

Dua lokasi TPSA yang dimiliki, yaitu TPA Pasirbuluh di Kecamatan Lembang (±2,2 ha) dan TPSA Sarimukti (±25 ha) di Kecamatan Cipatat. yang digunakan oleh Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat harus menjaga lokasi-lokasi TPSA tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga keberadaan TPSA tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, terutama dari komunitas dan pemerhati lingkungan. Berbagai terobosan pengelolaan sampah yang baik dan aman terhadap lingkungan diharapkan akan memperpanjang usia TPSA dan meredam resistensi masyarakat terhadap keberadaan TPSA tersebut.

Tabel 2.29. Tempat Pengolahan Sampah

NO	KECAMATAN	JENIS PENGOLAHAN			
		TPSS		TPA	
		LOKASI	LUAS (M ²)	LOKASI	LUAS (M ²)
1	Cililin	7	10.520	-	-
2	Cihampelas	-	-	-	-
3	Sindangkerta	-	-	-	-
4	Gununghalu	-	-	-	-
5	Rongga	-	-	-	-
6	Cipongkor	-	-	-	-
7	Batujajar	1	8	-	-
8	Lembang	14	10	1	22.000
9	Parongpong	1	132	-	-

10	Cisarua	-	-	-	-
11	Ngamprah	-	-	-	-
12	Padalarang	1	50	-	-
13	Cipatat	-	-	-	-
14	Cipeundeuy	-	-	1	250.000
15	Cikalongwetan	-	-	-	-
TOTAL		24	10.720	2	272.000

Sumber: Basis Data Pembangunan Daerah Kab. Bandung 2005. diolah kembali oleh BAPPEDA KBB

Cakupan pelayanan persampahan meliputi Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) sampah berjumlah 2 unit dengan luas 27,2 ha dan jumlah TPSS 24 unit dengan luas 10.720 m². Jumlah dan kapasitas tersebut masih belum mampu menampung dan mengelola sampah yang volumenya semakin meningkat (Tabel 2.29).

2.8.2.5 Energi Listrik

Salah satu alternatif sumber pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi PLTA yang cukup besar, yaitu PLTA Saguling dan Cirata. Di sisi lain Tarif Daya Listrik (TDL) yang semakin mahal diikuti dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah berakibat pada penggunaan bahan bakar batubara sebagai pengganti BBM pada industri-industri.

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bandung Barat masih ada desa di beberapa kecamatan yang belum seluruhnya teraliri listrik yaitu Kecamatan Gununghalu, Rongga, Cililin, Batujajar, Cipongkor, Cipatat, dan Cikalongwetan.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi panas bumi yang cukup besar sebagai salah satu alternatif sumber pembangkit tenaga listrik yaitu Tangkuban Perahu (terduga 190 MW) juga merupakan lokasi prospek untuk pengembangan PLTP Pemerintah Daerah karena berada di luar WKP milik Pertamina.

Seiring dengan semakin mahalnya TDL dan dikurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang menyebabkan tingginya harga BBM, serta ditetapkannya Kebijakan Diversifikasi Energi Nasional sebagai bagian dari Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) yang mengarahkan

pada pengurangan pemakaian minyak bumi dan meningkatkan pemakaian batubara dan gas, terjadi peningkatan penggunaan bahan bakar batubara sebagai pengganti BBM pada industri-industri.

Penggunaan batubara di Kabupaten Bandung Barat mulai menjadi fenomena tersendiri sejak Tahun 2003. Setelah itu, terjadi peningkatan pengalihan atau penggunaan batubara pengganti BBM di Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data-data penggunaan batubara dari 40 industri serta data dari API Jabar dan kemudian dilakukan perhitungan dengan asumsi-asumsi tertentu, maka perkiraan penggunaan batubara di Kabupaten Bandung adalah 1.200 ton per hari (Dinas Lingkungan Hidup, 2006).

Penggunaan batubara ini di satu pihak akan membantu industri dalam menjalankan kegiatan industrinya karena biaya produksi dapat ditekan. Namun di pihak lain, limbahnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara benar. Menyikapi hal ini maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk melakukan penanganan limbah batubara secara terpadu. Penanganan yang paling tepat adalah dengan memanfaatkan limbah batubara menjadi komoditi yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

2.8.2.6 Penerangan

Sumber daya energi secara garis besar dapat dilihat dari ketersediaan listrik di tiap kecamatan. Dalam konteks kekinian, adanya penerangan merupakan salah satu indikator terpenuhinya kebutuhan penduduk. Secara umum, mayoritas penduduk di Kabupaten Bandung Barat menggunakan PLN sebagai sumber penerangan listrik. Adapun sumber lainnya kurang dominan (Tabel 2.30).

Tabel 2.30. Sumber Penerangan (rumah tangga)

KECAMATAN	PLN	NON PLN	LAINNYA
Cililin	20.702	1.003	143
Cihampelas	23.316	146	-
Sindangkerta	16.019	-	-
Gununghalu	21.170	329	-

Rongga	15.693	-	169
Cipongkor	21.447	175	175
Batujajar	28.357	-	-
Lembang	41.966	-	137
Parongpong	22.837	-	-
Cisarua	18.755	170	-
Ngamprah	36.174	-	-
Padalarang	38.829	-	159
Cipatat	29.906	-	127
Cipeundeuy	21.690	236	-
Cikalongwetan	29.202	-	-
TOTAL	386.064	2.061	910

Sumber: SUSEDA, BPS Kabupaten Bandung 2007

2.8.2.7 Prasarana Jalan

Arahan pengembangan ruas prasarana jalan dari *review* RTRW Kabupaten Bandung 2005-2010 dan masukan beberapa pihak untuk zona Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jalan tol:
 - a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang
 - b. Bogor – Sukabumi – Padalarang
 - c. Pembukaan akses Tol/Interchange Warungdomba/Cikalong Wetan-Cipeundeuy dan Padalarang-Ngamprah.
2. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung:
 - a. Batujajar – Cimareme - Padalarang – Cipatat
 - b. Padalarang – Cikamuning
 - c. Maribaya – Cileunyi
 - d. Padalarang – Ngamprah – Cisarua – Parongpong – Lembang
 - e. Sersan Bajuri – Cihideung – Parongpong
 - f. Lembang – Mekarwangi – Dago
 - g. Cipatat – Cipongkor – Sindangkerta
 - h. Cihampelas – Cililin – Sindangkerta – Gununghalu – Rongga
 - i. Sindangkerta – Ciwidey
 - j. Cihampelas – Leuwisapi – Nanjung
 - k. Cihampelas – Batujajar
 - l. Citunjung – BBS (Selacau)
 - m. Giriasih – Leuwigajah
 - n. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalong Wetan

- o. Cipongkor – Rongga
- p. Parongpong – Ciwaruga – Cigugur Girang–Cihanjuang
- q. Cihanjuang – Cibaligo – Parongpong
- r. Penataan jalan kota (Padalarang, Cililin, Lembang, dan Batujajar)
- s. Rongga – Buninagara – perbatasan Kabupaten Cianjur
- t. Pakuhaji – Ngamprah – Parongpong
- u. Lembang - Ciater – Jalan Cagak

Sejak dahulu Kabupaten Bandung Barat dilalui oleh jalan nasional yang strategis, yaitu *De Grootte Post Weg* atau biasa disebut sebagai Jalan Raya Pos yang melintasi Padalarang. Pada saat itu, moda transportasi yang digunakan di jalan ini masih berupa pedati.

2.9 Pemerintahan Umum

2.9.1 Personalia/Kepegawaian

Jumlah pegawai pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari PNS dan CPNS serta tenaga kontrak. Jumlah pegawai yang tersebar di 15 kecamatan sebanyak 12.671 orang, meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan CPNS sebanyak 9.268 orang yang terdiri dari:
 - a. PNS sebanyak 8.735 orang.
 - b. CPNS sebanyak 533 orang.
2. Tenaga Kontrak Kerja/Pegawai Tidak tetap dan Sukarelawan sebanyak 3.403 orang terdiri dari:
 - a. TKK sebanyak 370 orang.
 - b. Sukwan sebanyak 3.033 orang

2.9.2 Perlengkapan dan Aset Pemerintah

Ada beberapa aset yang dimiliki oleh pemerintah, baik yang tetap maupun bergerak. Secara detail, perlengkapan dan aset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah sebanyak 889 bidang tanah seluas 2.208.339 m².
2. Bangunan seluas 364.861 m² dan sarana perlengkapan sebanyak 974 unit.
3. Inventaris kantor sebanyak 132.089 unit.

4. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 113 unit dan roda empat 35 unit.
5. Alat berat (*stoomwalls*) sebanyak 14 unit.

2.9.3 Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) mengacu kepada PP 41 Tahun 2006. Menurut rencana SOPD Kabupaten Bandung Barat disepakati terdiri dari Sekretariat Daerah dan DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Perangkat Kecamatan. SOPD meliputi:

1. Sekretariat Daerah dan DPRD
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris DPRD
2. Dinas Daerah
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
 - g. Dinas Bina Marga dan Pengairan
 - h. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 - i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
 - j. Dinas Peternakan dan Perikanan
 - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Lembaga Teknis Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - e. Kantor Lingkungan Hidup
 - f. Kantor Penanaman Modal
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
 - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- i. Kantor Ketahanan Pangan
- j. Inspektorat
- k. Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Kecamatan

2.9.4 Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang paling menonjol di Kabupaten Bandung Barat adalah belum terdapatnya kantor pusat pemerintahan sehingga fungsi pelayanan kurang terintegrasi. Bagi sebagian masyarakat, tentunya hal ini cukup menyulitkan, apalagi letak antar kantor tidak saling berdekatan. Bagi pemerintah sendiri, kondisi ini menimbulkan inefisiensi waktu tempuh jika ada kebutuhan yang sifatnya lintas sektoral. Oleh karena itu, upaya pembangunan kantor pusat pemerintahan yang terpadu sangat dibutuhkan.